



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



**KETERANGAN TERTULIS BAWASLU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PHPU  
PEMILU DPD, DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019**



**ALAMAT KANTOR :**

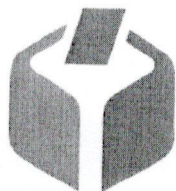
**JLN. UDAYANA NO.10 MATARAM NTB**

 [ntb.bawasluhdi.id](mailto:ntb.bawasluhdi.id)

 [Bawasluprovntb](https://www.facebook.com/Bawasluprovntb)

 <http://bawaslu.ntbprov.go.id/>

 [Bawaslu\\_ntb](https://www.instagram.com/Bawaslu_ntb)



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 75/K.NB/HK.01.00/VII/2019

Mataram, 5 Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu  
Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada;

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>Bawaslu</i>	
NOMOR <i>56-14-18</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>5 Juli 2019</i>
WAKTU	: <i>16:12 WIB</i>

## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut :

### A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

#### 1. Keterangan Tertulis Pokok Permohonan DPD.

- 1.1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD Nomor Register Perkara **03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Calon Dewan Perwakilan Daerah Nomor urut 27 atas nama Prof. Dr. Farouk Muhammad.

## 2. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

### 2.2.2.1. Keterangan tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Delapan (8) DPRD Provinsi **Partai Politik Demokrat** dengan Nomor Register Perkara **56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

- a. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu NTB pada proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, termasuk didalamnya saksi dari partai Demokrat, selama rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut saksi partai Demokrat tidak pernah mengajukan keberatan, koreksi, sinkronisasi dan perbaikan terhadap hasil perolehan suara untuk masing-masing parpol dan calon anggota DPRD Provinsi dari partai Demokrat. **(Bukti PK. 19.09).**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2019 KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan hasil perolehan suara peserta Pemilu untuk Pemilu Presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk seluruh kecamatan di kabupaten Lombok Tengah, yang dalam perkara ini khususnya perolehan suara partai demokrat pada Dapil NTB – 8 yang terdiri dari 6 kecamatan sejumlah 24.219 **(Bukti PK.19.2.10)**
- c. Bahwa dalam perkara ini *locus* keberatan hanya terdapat pada 3 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Praya Timur, Praya Barat dan Pujut untuk perolehan suara calon dalam 1 (satu) partai politik antara calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi yang memperoleh suara 6335 (*enam ribu*

*tiga ratus tiga puluh lima*), dan calon nomor urut 4 atas nama M. Samsul Qomar yang memperoleh suara 6054 (*enam ribu lima puluh empat*) suara.

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 7 Mei 2019 untuk Kecamatan Praya Timur tidak terdapat keberatan dari saksi peserta Pemilu dan tidak terdapat perubahan atau pembetulan terhadap perolehan suara pada tingkat Kecamatan (**Bukti.PK.19.2.11**).
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 8 Mei 2019 untuk Kecamatan Praya Barat terdapat keberatan dari saksi partai politik Perindo terhadap perolehan suara Partai Kebangkita Bangsa (PKB) khususnya calon nomor urut 1 di Desa Mangkung. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyarankan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengecekan berdasarkan DA1 Plano DPRD Provinsi Dapil NTB-8 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuka DA1 Plano dimana perolehan suara sama dengan yang ada dalam DA1 yang dibacakan oleh PPK yaitu 2096 (dua ribu sembilan uluh enam) suara untuk calon nomor urut 1 (satu) (**Bukti.PK.19.2.12**).
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 9 Mei 2019 untuk Kecamatan Pujut untuk rekapitulasi perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu terhadap perolehan suara. Sedangkan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten terdapat keberatan dari saksi papol Gerindra dan Nasdem. Terhadap protes tersebut Bawaslu Lombok Tengah menyarankan untuk dilakukan pengecekan

berdasarkan C1 Plano terhadap TPS 5, 14 dan 31 Desa Prabu, TPS 3, 5 dan 14 Desa Ketare. Terhadap saran tersebut KPU Kabupaten Lombok Tengah hanya melakukan pengecekan terhadap TPS 5 Desa Prabu dan TPS 3 Desa Ketare. **(Bukti.PK.19.2.13)**

- g. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon yaitu Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB Dapil NTB-8 yang ada di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Praya Barat. Terhadap dalil tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa Hasil perolehan suara partai Demokrat di Kecamatan Pujut sejumlah 5.176 (lima ribu seratus tujuh puluh enam) suara yang terdiri dari suara partai dan suara calon. Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Lalu Riadi memperoleh suara sejumlah 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) sedangkan calon dengan nomor urut 4 (empat) atas nama M. Samsul Komar sejumlah 1.701 (seribu tujuh ratus satu) suara **(Bukti.PK.19.2.14)**.
- h. Bahwa di Kecamatan Praya Timur perolehan suara partai Demokrat sejumlah 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) suara. Yang terdiri dari perolehan calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sejumlah 267 dan calon nomor urut 4 atas nama Samsul Komar sejumlah 289 **(Bukti.PK.19.2.15)**. Di Kecamatan Praya Barat perolehan suara partai Demokrat sejumlah 3.743 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga suara). Yang terdiri dari perolehan calon nomor urut 1 atas nama Lalu Riadi sejumlah 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) dan calon nomor urut 4 (empat) atas nama M. Samsul Komar sejumlah 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) **(Bukti.PK.19.2.16)**.
- i. Untuk mempermudah dalam membandingkan kami sampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ;

Table Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Dapil NTB-8 Partai Demokrat versi berdasarkan model DA1 Pemberi Keterangan

Kecamatan	Nomor Urut dan Nama Calon	Perolehan Suara versi Pemberi Keterangan	Kode Bukti
Pujut	<b>Suara Partai</b>	350	<i>(vide Bukti PK 19.2.5)</i>
	<b>1. Lalu Riadi (Pihak Terkait)</b>	<b>1.833</b>	
	2. L. Abdul Halik Iskandar	667	
	3. Bq. Nisfi Hidayati	84	
	<b>4. M. Samsul Qomar (Pemohon)</b>	<b>1.701</b>	
	5. Ratna Ayu Yistiana	44	
	6. Sri Puji Utami	58	
	7. Marju	459	
Praya Timur	Suara Partai	160	<i>(vide Bukti PK 19.2.6)</i>
	<b>1. Lalu Riadi (Pihak Terkait)</b>	<b>267</b>	
	2. L. Abdul Halik Iskandar	178	
	3. Bq. Nisfi Hidayati	39	
	<b>4. M. Samsul Qomar (Pemohon)</b>	<b>289</b>	
	5. Ratna Ayu Yistiana	40	
	6. Sri Puji Utami	21	
	7. Marju	2.800	
Praya Barat	Suara Partai	444	<i>(vide Bukti PK 19.2.7)</i>
	<b>1. Lalu Riadi (Pihak Terkait)</b>	<b>2.144</b>	
	2. L. Abdul Halik Iskandar	516	
	3. Bq. Nisfi Hidayati	62	
	<b>4. M. Samsul Qomar (Pemohon)</b>	<b>493</b>	
	5. Ratna Ayu Yistiana	21	
	6. Sri Puji Utami	16	
	7. Marju	47	

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu kecamatan Pujut mulai dari tanggal 19 April 2019 sampai tanggal 8 Mei 2019 secara umum rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan dalam 3 panel rapat pleno.
- k. Bahwa dalam rapat pleno tersebut pada tingkat pemilihan anggota DPRD Provinsi ditemukan 22 TPS yang salinan C1 nya berbeda perolehan suara sehingga disarankan oleh

Panwaslu Kecamatan untuk dilaksanakan pengecekan berdasarkan C1 Plano yaitu TPS 26,27,29 dan 31 untuk desa Rembitan yang hasilnya didituangkan sebagaimana tercatat dalam formulir model DAA1 Desa Rembitan (**Vide Bukti. PK.19.2.14**), TPS 2, 23,25, 28,31 dan 35 untuk Desa sengkol yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam model DAA1 Desa Sengkol (**Vide Bukti. PK.19.2.14**), TPS 18,19,10,21,22,23,24,25,26,27,28 dan 29 untuk Desa Mertak yang hasilnya dituangkan sebagaimana dalam formulir model DAA1 Desa Mertak (**Vide Bukti. PK.19.2.14**), dan terdapat 1 TPS yang dilaksanakan berdasarkan hasil penghitungan suara ulang ditingkat kecamatan yaitu TPS 21 desa Kute yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam formulir model DAA1 desa Kute (**Vide Bukti. PK.19.2.14**), .

- I. Bahwa proses pleno rekapitulasi suara di kecamatan pujut berlangsung tegang karena sempat terjadi kerusuhan masa pendukung calon tertentu bahkan protes dilakukan ke kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resort Lombok Tengah dan berkesimpulan untuk mengeluarkan rekomendasi agar pelaksanaan pleno perlu untuk dipindahkan ke tempat lain yang relatif aman dan kondusif. (**Bukti PK19.2.17**).
- m. Bahwa terhadap rekomendasi *a quo*, KPU Kabupaten Lombok Tengah bersikukuh agar proses pleno tetap dilanjutkan di lokasi semula. (**Bukti PK19.2.18**).
  - Bahwa Terdapat salah input pada bagian DPT, DPK, DPTb di Desa Tanak Awu pada semua tingkatan sehingga Panwaslu Kecamatan, saksi dan PPS sepakat untuk membuka kotak suara (**vide Bukti. PK.19.2.4**).

- Bahwa Terdapat perbedaan data C1 saksi, C1 hologram dan C1 panwas di semua TPS Desa Ketare untuk tingkat DPRD Provinsi sehingga saksi dari Partai Demokrat meminta untuk membuka C1 Plano sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk membuka C1 Plano tetapi tidak ditindak lanjuti oleh PPK kecamatan pujung sehingga rekapitulasi tetap dilaksanakan berdasarkan formulir C1 yang ada pada PPK kecamatan pujung (**vide Bukti. PK.19.2.4**). yang untuk memudahkan dalam penilaian kami sampaikan dalam bentuk tabel:



Tabel 4. Perolehan Suara berdasarkan DAA1 hasil Pengawasan Desa Ketare; (*Bukti PK19.2.19*)

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon	<b>Perolehan suara Menurut hasil pengawasan</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	1	13	10	<b>13</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	2	45	34	<b>45</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		12	12	<b>12</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	3	8	0	<b>8</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		3	3	<b>3</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	4	81	72	<b>81</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		3	3	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	5	25	25	<b>25</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		52	52	<b>52</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	6	31	26	<b>31</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	4	<b>4</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	7	26	14	<b>26</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		5	5	<b>5</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	8	46	8	<b>46</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	9	49	25	<b>49</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		9	9	<b>9</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	10	32	12	<b>32</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	4	<b>4</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	11	16	2	<b>16</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	12	9	0	<b>9</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	4	<b>4</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	13	23	6	<b>23</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	0	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	14	7	6	<b>7</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		5	5	<b>5</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	15	57	46	<b>57</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		4	4	<b>4</b>

1. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Tumpak pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.20**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

Tabel perbandingan perolehan suara Perolehan Suara dengan hasil Pengawasan di Desa Tumpak berdasarkan DAA1

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara menurut Termohon	Perolehan Suara menurut Pemohon	Perolehan suara menurut hasil pengawasan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	2	23	21	<b>23</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	1	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	4	9	3	<b>9</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	6	6	4	<b>10</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	<b>1</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	8	15	0	<b>15</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	13	1	0	<b>0</b>
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	<b>0</b>

2. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Pengembur pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.21**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

Tabel 6. Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan hasil Pengawasan di Desa Pengembur

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon (KPU)	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi <i>((Pihak terkait))</i>	9	12	1	12
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	34	37	0	37
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	0

3. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Tanak Awu pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.22**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

Tabel 7. Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan hasil Pengawasan di Desa Tanak Awu

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	<i>Perolehan suara menurut versi pemberi keterangan</i>
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	12	4	2	4
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		2	2	2
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	13	28	1	28
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		1	5	1
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	14	24	0	24
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	4	0

4. Bahwa sebagaimana Hasil Pengawasan Rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan Praya Timur yang dalam pengawasan *a quo* berpegangan pada Formulir Model C1 yang diperoleh dari pengawas TPS. Dan terhadap TPS di masing-masing Desa yang dipermasalahkan sebagaimana pokok permohonan pemohon dapat kami terangkan sebagai berikut; (***Vide Bukti PK.19.2.2***)
5. Bahwa proses pleno rekapitulasi di Kecamatan Praya Timur dilakukan dengan mengacu pada C1 hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di masing-masing TPS, apabila pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat satu atau lebih yang tidak bersesuaian khususnya pada perolehan suara salah satu peserta pemilu maka PPK Kecamatan, PPS, Panwaslu Kecamatan dan saksi peserta Pemilu melakukan sinkronisasi dengan membuka C1 Plano yang terdapat di dalam Kotak.
6. Bahwa pada proses pleno rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang di mohonkan oleh pemohon di Desa Beleka pada TPS 1 sampai dengan TPS 17, TPS 23 dan TPS 31. Desa Mujur pada TPS 2, 5, 6, 8, 12, 21, 22, dan 28. Desa Sengkerang Pada TPS 1, 4, 12, 13, 17, 24, dan TPS 25. Desa Semoyang pada TPS 4, 11, 13, dan TPS 22 semuanya dilakukan dengan cara membuka C1 Plano, hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Praya Timur dikarenakan terdapat ketidak sesuaian data pada C1 Salinan yang dipegang oleh masing-masing peserta pleno rekapitulasi baik panwas dan saksi-saksi peserta pemilu. Sehingga perolehan suara di desa-desa tersebut adalah: (Tabel 8; Tabel 9; Tabel 10; dan Tabel 11).

7. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Beleka pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas Kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.23**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

Tabel 8. Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Beleka

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara menurut hasil pengawasan
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	1	5	0	5
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	1
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	2	1	0	1
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	7	2	0	2
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	5	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	10	5	0	5
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	1
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	11	6	1	6
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	12	3	1	3
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	1
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	13	6	1	6
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	14	2	0	2
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	15	4	2	4
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		1	1	1
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	16	2	0	2
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	19	3	0	3
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	31	1	0	1
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	32	1	0	1
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0

8. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Mujur pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.24**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

Tabel 9. Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Mujur

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	2	8	3	3
<b>M.Samsul Qomar</b> <i>(Pemohon)</i>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	5	3	0	2
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		1	1	1
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	6	1	0	1
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		1	1	1
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	8	5	3	3
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		6	6	6
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	12	2	0	2
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	1
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	21	5	0	3
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	22	3	1	1
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	28	1	0	1
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	0

9. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Sengkerang pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.25**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 10.** Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Sengkerang

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan suara versi pemberi keterangan
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	1	1	0	1
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	4	8	3	3
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	12	1	0	1
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	13	2	0	0
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	17	8	0	3
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	24	3	0	0
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	25	1	0	1
M.Samsul Qomar (Pemohon)		0	0	0

10. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Semoyang pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.26**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 11:** *Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Semoyang*

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon	Perolehan Suara Menurut Pemohon	<i>Perolehan suara menurut Hasil Pengawasan</i>
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	4	2	1	<b>2</b>
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	11	6	1	<b>6</b>
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	13	2	0	<b>2</b>
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	<b>0</b>
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	22	1	0	<b>1</b>
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	<b>0</b>



- n. Bahwa Sebagaimana Hasil Pengawasan Rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan Praya Barat yang dalam pengawasannya berpegangan pada Formulir Model C1 yang diperoleh dari pengawas TPS. Dan terhadap TPS di masing-masing Desa yang dipermasalahkan sebagaimana pokok permohonan pemohon dapat kami terangkan sebagai berikut; **(Vide Bukti PK.19.2.3)**
- o. Bahwa pada proses pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan Praya Barat mengacu pada C1 hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan mekanisme pencocokan data yang di pegang saksi peserta rapat pleno rekapitulasi, apabila terdapat perbedaan data dan perolehan suara masing-masing peserta pemilu maka dilakukan mekanisme sinkronisasi dengan membuka c1 plano yang terdapat dalam kotak suara, apabila dalam C1 plano belum terdapat sinkronisasi maka dilakukan penghitungan suara ulang.
- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Praya Barat, mekanisme rekapitulasi dilakukan dengan membuka C1 Plano sebagaimana disebutkan di atas sehingga apa yang di persoalkan oleh pemohon di Desa Selong Belanak pada TPS 5,6, 11, dan TPS 13. Desa Bonder pada TPS 7, dan Desa Setanggor pada TPS 8 sudah dilakukan sinkronisasi data dengan membuka C1 plano yang terdapat di dalam kotak, sehingga perolehan suara pemohon dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

1. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Selong Belanak pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecmatat Pujut (**Bukti PK.19.2.27**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 12:** *Perolehan Suara Pemohon berdasarkan hasil Pengawasan di Desa Selong Belanak*

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	<b>Perolehan suara versi pemberi keterangan</b>
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	5	42	22	42
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	1
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	6	143	41	143
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	11	35	16	35
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0
Lalu Riadi ( <i>Pihak terkait</i> )	13	26	16	26
M.Samsul Qomar ( <i>Pemohon</i> )		0	0	0

2. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Bonder pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecmatat Pujut (**Bukti PK.19.2.28**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 13:** *Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan hasil Pengawasan di Desa Bonder*

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	<b>Perolehan suara versi pemberi keterangan</b>
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	7	8	1	<b>8</b>
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	1	<b>0</b>

3. Bahwa perolehan suara partai Demokrat di Desa Setanggor pada TPS–TPS yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan pemohon berdasarkan formulir model DAA1 yang diterima oleh Panwas kecamatan Pujut (**Bukti PK.19.2.29**), untuk memudahkan kami sampaikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 13:** *Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Hasil Pengawasan di Desa Setanggor*

Nama Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	<b>Perolehan suara versi pemberi keterangan</b>
Lalu Riadi <i>(Pihak terkait)</i>	8	3	1	<b>3</b>
M.Samsul Qomar <i>(Pemohon)</i>		0	0	<b>0</b>

2.2.3.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat **Partai Demokrat** Daerah Pemilihan Dua (DAPIL2) dengan Nomor Register Perkara **56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan pada semua tahapan yang menjadi locus permohonan yang dimohonkan oleh Partai Demokrat, mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi calon, penetapan calon, kampanye, sampai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS yang ada di Lombok Barat yang berjumlah 2.200 TPS dan di Daerah Pemilihan 2 (dua) yang meliputi kecamatan Lembar sebanyak 167 TPS dan Kecamatan Sekotong sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) TPS. Sehingga jumlah total TPS yang ada di Dapil 2 sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) TPS. **(PK.19.1.1)**
2. Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon pada angka 2 yang mendalilkan angka-angka perolehan suara versi pemohon, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Lombok Barat dapat kami sandingkan sebagai berikut:

Tabel perbandingan angka versi pemohon dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

N O	Partai Politik	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Menurut pemohon	Hasil pengawasan
1	PKB	7247	6913	334	7247
2	GERINDRA	9452	8853	599	9452
3	PDIP	5074	4568	506	5074
4	GOLKAR	8769	7518	1.251	8769
5	NASDEM	2889	2772	117	2889
6	GARUDA	1049	893	156	1049
7	BERKARYA	5190	4122	1.068	5190
8	PKS	6130	5683	447	6130
9	PERINDO	325	305	20	325
10	PPP	5887	5523	364	5887
11	PSI	144	122	22	144
12	PAN	3640	3192	448	3640
13	HANURA	3894	3597	297	3894
<b>14</b>	<b>DEMOKRAT</b>	<b>2932</b>	<b>2932</b>	-	<b>2932</b>
15	PBB	3729	3729	-	3729
16	PKPI	319	275	44	319

3. Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon pada angka 3 yang mendalilkan bahwa Pengawas Pemilu di Kabupaten Lombok Barat tidak melakukan pengawasan

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penindakan sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu, diantaranya :

- a. Bahwa untuk memastikan seluruh tahapan dan proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara bagi Panwaslu Kecamatan Se-Lombok Barat, pada tanggal 19-20 Mei 2019, bertempat di Hotel Jayakarta Senggigi. **(PK.19.1.2)**
- b. Bahwa untuk memastikan kelengkapan, jumlah dan kondisi logistik untuk kebutuhan Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis pengawasan distribusi logistik bagi Panwaslu Kecamatan pada tanggal 21-22 Mei 2019, bertempat di hotel Lombok Astoria. **(PK.19.1.3)**
- c. Bahwa untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melaksanakan bimbingan teknis melalui Panwaslu Kecamatan bagi Saksi partai politik se-Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 7-10 April 2019, bertempat di Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.4)**
- d. Bahwa untuk memastikan tahapan pemungutan dan penghitungan suara terawasi di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS), Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melantik dan memberikan bimbingan teknis pengawasan terhadap pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) se-Lombok Barat pada 10 APRIL 2019, bertempat di Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat **(PK.19.1.5)**
- e. Bahwa untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye, *money politic* dan penyebaran bahan kampanye pada masa tenang, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menggelar kegiatan Apel Siaga Patroli Pengawasan hari tenang yang mengundang jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu

Kabupaten Lombok Barat, Bawaslu Provinsi, Polres Lombok Barat, Kodim Lombok Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Satpol PP, Dinas Pertamanan dan Tata Kota, pada tanggal 12 April 2019, bertempat di Lapangan Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.6)**

- f. Bahwa untuk memastikan kesiapan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta mendiskusikan teknis pengumpulan formulir C1, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan pada tanggal 15 April 2019, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.7)**
- g. Bahwa untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan alat kerja pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan instruksi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019. **(PK.19.1.8)**
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan kegiatan monitoring pengawasan terhadap tahapan pemungutan dan penghitungan suara ke seluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat **(PK.19.1.-9)**
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah membentuk tim untuk menginput data C1 yang dikumpulkan dari jajaran pengawas pemilu se-Kabupaten Lombok Barat melalui Panwaslu Kecamatan **(PK.19.1.10)**
- j. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menugaskan tim untuk melakukan monitoring proses pengumpulan dan input C1 ke masing-masing kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.11)**
- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan secara lisan untuk mengumpulkan dan menyampaikan formulir C1 ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.12)**
- l. Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat selain itu, melalui Panwaslu Kecamatan kecamatan Sekotong pada tanggal 28 april, mengeluarkan rekomendasi di pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK kecamatan sekotong untuk partai Gerindra

karena salah satu caleg partai Gerindra untuk DPRD tingkat provinsi atas nama Naufar Furqony Farinduan melapor ke Bawaslu kabupaten Lombok Barat tentang kehilangan suara, sehingga Panwaslu Kecamatan Sekotong merekomendasikan kepada PPK kecamatan Sekotong untuk melakukan perbaikan perolehan suara caleg Gerindra tersebut dengan membuka C1 Plano. **(PK.19.1.13)**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam proses pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten, saksi partai Demokrat tidak mengajukan keberatan, mereka hanya mengajukan keberatan di kantor Bawaslu kabupaten Lombok Barat sebelum pleno dilaksanakan bersama dengan caleg partai Nasdem, Gerindra dan PBB untuk DPRD kabupaten. Para Caleg yang tidak dimandatkan oleh partai mereka sebagai saksi pada Pleno yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat meminta ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat secara lisan untuk merekomendasikan penundaan pleno dan meminta ke KPU untuk menjadikan mereka sebagai peserta pleno. Oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa saksi partai politik dan Bawaslu memiliki posisi yang sama dan setara sehingga permintaan mereka tidak bisa direkomendasikan karena saksi harus dimandatkan oleh partai politik masing-masing. **(PK.19.1.14)**.
5. Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon pada angka 6 (enam) yang mendalilkan angka-angka perolehan suara versi pemohon, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Sekotong dapat kami sampaikan dalam bentuk tabel masing-masing perolehan suara partai politik di tingkat desa sebanyak 6 desa yang terdiri dari Desa Palangan, Desa Gili Gde, Desa Batu Putih, Desa Taman Baru, Buwun Mas dan Sekotong Barat sebagai berikut ini ;

#### **1. Desa Pelangan**

Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di Desa Pelangan di bawah ini belum sesuai dikarenakan data perolehan pada formulir C1 belum lengkap pada TPS 1, 20 dan 32 diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. **(PK.19.1.15)**

Tabel 1

Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan Berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Pelangan.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	32	36	21	30
2	GERINDRA	69	69	45	81
3	PDIP	718	908	856	916
4	GOLKAR	217	275	227	256
5	NASDEM	30	32	26	32
6	GARUDA	14	12	12	12
7	BERKARYA	1214	1355	1359	1423
8	PKS	594	565	450	654
9	PERINDO	23	22	19	18
10	PPP	225	231	59	90
11	PSI	13	15	8	12
12	PAN	1136	1210	1261	1403
13	HANURA	136	150	118	134
14	DEMOKRAT	83	91	49	76
15	PBB	271	275	231	272
16	PKPI	4	3	3	3

## 2. Desa Gili Gde

Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan Berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Gili Gde.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	81	128	128	128
2	GERINDRA	43	49	49	49
3	PDIP	15	13	13	13
4	GOLKAR	77	173	129	173
5	NASDEM	7	0	0	0
6	GARUDA	4	1	1	1
7	BERKARYA	40	89	134	89
8	PKS	356	364	364	364
9	PERINDO	4	1	1	1
10	PPP	17	6	19	6
11	PSI	0	1	1	1
12	PAN	69	67	67	67



13	HANURA	13	3	3	3
14	DEMOKRAT	8	4	4	4
15	PBB	3	5	5	5
16	PKPI	1	2	4	2

### 3. Desa Batu Putih

Tabel 3

Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Batu Putih.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	72	149	125	164
2	GERINDRA	68	147	159	177
3	PDIP	46	186	241	211
4	GOLKAR	20	50	49	57
5	NASDEM	17	46	46	50
6	GARUDA	111	183	117	188
7	BERKARYA	246	597	659	790
8	PKS	163	392	536	592
9	PERINDO	21	47	53	56
10	PPP	45	138	148	168
11	PSI	3	15	17	17
12	PAN	146	344	411	434
13	HANURA	157	323	337	373
14	DEMOKRAT	74	175	158	189
15	PBB	13	33	29	36
16	PKPI	4	19	14	17

### 4. Desa Taman Baru

Tabel

Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan Berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Taman Baru

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	76	76	56	77
2	GERINDRA	583	558	353	558
3	PDIP	28	32	23	33
4	GOLKAR	500	632	435	632
5	NASDEM	124	123	84	124
6	GARUDA	15	15	6	15
7	BERKARYA	111	280	149	284

8	PKS	211	211	116	211
9	PERINDO	5	5	5	5
10	PPP	107	180	84	108
11	PSI	1	5	0	2
12	PAN	120	202	98	120
13	HANURA	8	92	3	8
14	DEMOKRAT	337	225	161	226
15	PBB	99	99	65	99
16	PKPI	7	6	6	7

#### 5. Desa Buwun Mas

Tabel

Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Buwun Mas

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	773	843	751	837
2	GERINDRA	2504	2738	2623	2738
3	PDIP	118	121	119	121
4	GOLKAR	1104	1147	1039	1153
5	NASDEM	175	175	175	176
6	GARUDA	150	156	156	156
7	BERKARYA	553	569	562	541
8	PKS	146	173	147	156
9	PERINDO	18	19	19	19
10	PPP	1686	1702	1686	1739
11	PSI	16	16	14	14
12	PAN	75	71	73	73
13	HANURA	116	119	126	147
14	DEMOKRAT	24	81	61	61
15	PBB	90	88	89	91
16	PKPI	58	75	61	61

#### 6. Desa Sekotong Barat

Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di Desa Sekotong Barat di dibawah ini belum sesuai dikarenakan data perolehan pada formulir C1 belum lengkap pada TPS 27 dan 34 diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat (Bukti PK.19.1.16)

Tabel

Perbandingan Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Partai Politik menurut pemohon dan hasil pengawasan Berdasarkan Formulir C1 dan Formulir DAA1 Desa Sekotong Barat

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 (PEMOHON)		PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN REKAP FORMULIR C1 DAN DAA1 HASIL PENGAWASAN	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	330	466	406	466
2	GERINDRA	384	698	614	689
3	PDIP	219	390	281	390
4	GOLKAR	135	1081	976	1081
5	NASDEM	142	236	229	236
6	GARUDA	66	149	99	109
7	BERKARYA	217	559	494	559
8	PKS	164	376	596	376
9	PERINDO	20	17	9	17
10	PPP	93	352	310	352
11	PSI	7	10	11	9
12	PAN	77	171	117	171
13	HANURA	72	112	93	112
14	DEMOKRAT	373	561	504	561
15	PBB	121	237	149	237
16	PKPI	15	28	28	29

6. Bahwa permohonan pemohon pada angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi selisih perolehan suara masing-masing parpol. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dapat dijelaskan dalam perbandingan table jumlah perolehan suara parpol serta selisih yang didalilkan oleh pemohon sebagai berikut:

Tabel

Tabel jumlah perolehan suara masing-masing parpol dan hasil pengawasan Bawaslu Lombok Barat.

No	NAMA PARTAI	C1 UNTUK 6 DESA MENURUT PEMOHON	DAA1 UNTUK 6 DESA MENURUT PEMOHON	SELISIH	CI UNTUK 6 DESA HASIL PENGAWASAN	DAA1 UNTUK 6 DESA HASIL PENGAWASAN
1	PKB	1364	1698	334	1487	1702
2	GERINDRA	3651	4250	599	3843	4292
3	PDIP	1144	1650	506	1533	1684
4	GOLKAR	2053	3304	1251	2855	3352
5	NASDEM	495	612	117	560	618
6	GARUDA	360	516	156	391	481
7	BERKARYA	2381	3449	1068	3357	3686
8	PKS	1634	2081	447	2209	2353
9	PERINDO	91	111	20	106	116
10	PPP	2173	2537	364	2306	2463
11	PSI	40	62	22	51	55
12	PAN	1617	2065	448	2027	2268
13	HANURA	502	799	297	680	777
14	DEMOKRAT	899	1137	-	937	1117
15	PBB	597	737	140	568	740
16	PKPI	89	133	44	116	119

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pleno di tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Barat **(Bukti PK.19.1.17)**
8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sekotong telah melakukan pengawasan terhadap proses pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dari tanggal 19-29 April 2019 **(Bukti PK.19.1.18)**
9. Bahwa dalam proses pleno rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan dari saksi partai Demokrat terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Sekotong dalam lembar keberatan yang ditandatangani oleh PPK
10. Bahwa atas keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Demokrat, PPK Kecamatan Sekotong mencatatnya dalam formulir DA2 dan ditandatangani oleh saksi partai demokrat

**(Bukti PK.19.1.19)**

11. Bahwa rekapitulasi perolehan suara masing-masing partai politik di daerah pemilihan Kabupaten Lombok Barat 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) belum sesuai dikarenakan perolehan suara masing-masing partai politik pada TPS 27 dan 34 Desa Sekotong Barat dan TPS 1, 20 dan 32 Desa Pelangan belum lengkap diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. **(Bukti PK.19.1.20)**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pengawasan terhadap tahapan Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing partai politik di tingkat Kabupaten untuk daerah pemilihan Lombok Barat 2 (Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong) dengan rincian perolehan masing-masing partai politik sebagai berikut **(Bukti PK.19.1.21):**

Table  
Perbandingan data perolehan suara Pemohon dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat ditingkat Kabupaten

NO	PARTAI POLITIK	MENURUT PEMOHON					HASIL PENGAWASAN		
		SEKOTONG	LEMBAR	TOTAL PEROLEHAN SUARA	SELISIH	JUMLAH	SEKOTONG	LEMBAR	JUMLAH
1	PKB	4078	3169	7247	334	6913	4078	3169	7247
2	GERINDRA	5113	4339	9452	599	8853	5113	4339	9452
3	PDIP	1925	3149	5074	506	4568	1925	3149	5074
4	GOLKAR	6354	2415	8769	1251	7518	6354	2415	8769
5	NASDEM	1730	1159	2889	117	2772	1730	1159	2889
6	GARUDA	771	278	1049	156	893	771	278	1049
7	BERKARYA	3916	1274	5190	1068	4122	3916	1274	5190
8	PKS	2936	3194	6130	447	5683	2936	3194	6130
9	PERINDO	138	187	325	20	305	138	187	325
10	PPP	3103	2784	5887	364	5523	3103	2784	5887
11	PSI	64	80	144	22	122	64	80	144
12	PAN	2369	1271	3640	448	3192	2369	1271	3640
13	HANURA	966	2928	3894	297	3597	966	2928	3894
14	<b>DEMOKRAT</b>	<b>1162</b>	<b>1770</b>	<b>2932</b>	-	<b>2932</b>	<b>1162</b>	<b>1770</b>	<b>2932</b>
15	PBB	3045	684	3729	-	3729	3045	684	3729
16	PKPI	145	174	319	44	275	145	174	319

13. Bahwa terhadap Panitia Pengawas Kecamatan Sekotong yang tidak memberikan salinan C1 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, bahkan dari 225 (dua ratus dua puluh lima) TPS yang ada di Kecamatan Sekotong hanya 210 (dua ratus sepuluh) C1 Salinan yang diantar, itupun hanya 20 (dua puluh) yang asli sedangkan sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) adalah hasil fotocopy. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sudah mengambil tindakan terhadap Panwaslu Kecamatan Sekotong karena kelalaian dalam mengumpulkan C1 semua TPS yang ada di Kecamatan Sekotong dalam bentuk penegakan kode etik, dengan memberikan peringatan keras terhadap semua Komisioner Panwaslu Kecamatan Sekotong. **(Bukti PK.19.1.22)**
14. Bahwa Bawaslu Lombok Barat merekomendasikan kepada KPU Kab. Lombok Barat untuk penegakan kode etik kepada PPK dan PPS beberapa desa di Kecamatan Sekotong karena laporan dari beberapa Caleg DPRD Kabupaten (dopil 2) disebabkan tidak menempelkan C1 Salinan **(Bukti PK.19.1.23)**
15. Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Agus Supriady pada tanggal 29 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Agus Supriady adalah sebagai berikut: telah terjadi peristiwa dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Sekotong Barat dengan merubah formulir model C1. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena pelapor mencabut laporannya 2 (dua) hari setelah melapor. **(Bukti PK.19.1.24)**
16. Bahwa Bawaslu kabupaten Lombok Barat dalam proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten mengeluarkan rekomendasi perbaikan berbasis C1 plano terhadap laporan yang disampaikan oleh partai Beringin Karya untuk DPRD tingkat provinsi, karena saksi partai Beringin Karya melaporkan ke Bawaslu kabupaten Lombok Barat ditengah-tengah proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tentang kehilangan suara di desa Taman Baru untuk TPS 08 dan 09 dengan melampirkan salinan C1 dan DAA1. Dengan berdasarkan alat bukti tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan rekomendasi untuk sinkronisasi dengan

menggunakan C1 Plano. Setelah pembukaan C1 plano ada perubahan hasil sebagai berikut :

- a. Hasil partai berkarya untuk TPS 9 berjumlah 17 (tujuh belas)
- b. Hasil partai berkarya untuk TPS 8 berjumlah 36 (tiga puluh enam)
- c. Desa taman baru total berubah menjadi 86 (delapan puluh enam)
- d. Partai berkarya berubah menjadi 1379 (seribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) yang awalnya 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) sehingga menyebabkan selisih 53 (lima puluh tiga).

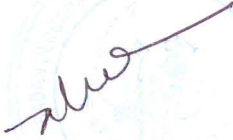
**(PK.19.1.25)**

17. Bahwa dengan dibukanya C1 plano sesuai rekomendasi Bawaslu kabupaten Lombok Barat, partai Beringin Karya yang awalnya memperoleh 53 (lima puluh tiga) suara di 2 (dua) TPS tersebut berubah menjadi 86 (delapan puluh enam) suara. Sehingga perolehan keseluruhan partai Beringin Karya untuk Kecamatan Sekotong sebanyak 1379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) sedangkan sebelum membuka C1 Plano sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam).
18. Bahwa setelah rekomendasi Bawaslu kabupaten Lombok Barat untuk membuka C1 plano, berdampak juga ke partai Golkar yang awalnya partai Golkar untuk DPRD tingkat provinsi mendapatkan suara sebanyak 21.404 (dua puluh satu ribu empat ratus empat), tetapi setelah membuka C1 plano, partai Golkar untuk DPRD tingkat Provinsi berkurang perolehan suaranya menjadi 21.232 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua) suara.
19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, akan merekomendasikan sinkronisasi menggunakan C1 Plano, apabila saksi-saksi partai politik di forum pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten mengajukan keberatan dengan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat yang disertai dengan alat-alat bukti, seperti yang kami rekomendasikan kepada KPU untuk perbaikan terhadap perolehan suara partai PBB dan Partai Berkarya untuk perolehan suara DPRD tingkat Provinsi tersebut. Tetapi saksi partai Demokrat dalam proses pleno rekapitulasi suara tingkat

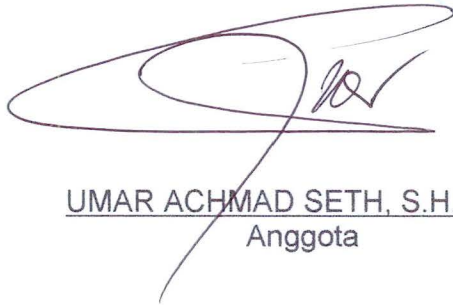
Kabupaten tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suaranya baik untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI.



Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.



MUHAMMAD KHUWAILID, S. Ag., M.H  
Ketua

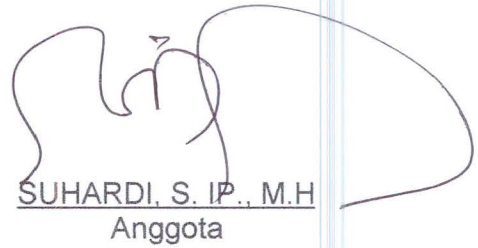


UMAR ACHMAD SETH, S.H., M.H  
Anggota



ITRATIP, S.T., MT  
Anggota

DR. Yuyun Nurul Azmi, S Pt., M. Pt  
Anggota



SUHARDI, S. IP., M.H  
Anggota